



Communication Management of the Regional Disaster Management Agency in Flood Disaster Management in Tolitoli Regency

Manajemen Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli

Sri Nawang Wulan^{1*}, Andi Febri Herawati¹, Rizqy Alfiyaty¹

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Keywords

*Disaster communication management;
Disaster mitigation;
BPBD Tolitoli Regency*

ABSTRACT

This study aims to find out how BPBD Tolitoli Regency's communication management. In addition, in handling disasters using qualitative descriptive methods with the theory of Puji Lestari in Susanto et al. and collecting data through observation, personal interviews and structured, and documented. This study used a purposive sampling method by taking four informants. The results of this study indicate that the Tolitoli Regency Regional Disaster Management Agency carried out the stages in accordance with the Law of the Republic of Indonesia number 24 of 2007 concerning disaster management. In the communication management plan, they carry out pre-disaster and post-disaster stages. They themselves have their own organizing and duties in disaster management. Then from disaster management planning and evaluation they always coordinate cooperation with relevant stakeholders. Self-evaluation in the event of a disaster they make into an action plan report that is the gradual development of the area of the disaster incident. For the inhibiting factors we saw that BPPD has problems related to difficult communication networks for remote areas and budgets for disaster management as well as a lack of infrastructure which is an obstacle to BPBD activities in flood disaster management.

Kata Kunci

Manajemen komunikasi bencana;
Mitigasi bencana;
BPBD Kabupaten Tolitoli

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi BPBD Kab.Tolitoli. Selain itu, dalam penanganan bencana menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Puji Lestari dalam Susanto dkk dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara pribadi dan terstruktur, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil empat narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli melakukan tahapan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada perencanaan manajemen komunikasi mereka melakukan tahap prabencana dan pascabencana. Mereka sendiri memiliki organizing dan tugasnya masing-masing dalam penanganan bencana. Lalu dari perencanaan penanganan bencana maupun evaluasi mereka selalu mengkoordinasikan kerja sama dengan stakeholder terkait. Evaluasi sendiri dalam kejadian bencana mereka membuatnya ke dalam sebuah laporan rencana aksi yaitu pembangunan bertahap dari wilayah kejadian bencana. Untuk faktor penghambat peneliti melihat bahwa BPPD sendiri memiliki masalah terkait jaringan komunikasi yang sulit untuk daerah terpencil dan anggaran dalam penanggulangan bencana serta kurangnya sarana prasarana yang menjadi penghambatnya aktivitas BPBD dalam penanggulangan bencana banjir.

*Corresponding author

Sri Nawang Wulan. Program studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Email: srinawangwulan979@gmail.com

<https://doi.org/10.22487/j.sochum.v8i2.1905>

Received 24 January 2023; Received in revised form 2 July 2024; Accepted 2 September 2024

Published 30 October 2024; Available online 30 October 2024

e-ISSN 2620-5491 / © 2024 The Authors.

Managed by the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

1. Pendahuluan

Memahami komunikasi bukanlah hal yang mudah. Banyak profesional komunikasi memahami dan mendefinisikan komunikasi dari perspektif yang berbeda. Komunikasi berasal dari kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu interaksi social untuk memenuhi kebutuhan material individual manusia sehinggalah menjadi sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Karir di semua disiplin ilmu memiliki kemampuan untuk menganalisis kondisi komunikasi, mengembangkan aktivitas komunikasi yang efektif, berkolaborasi secara efektif dengan orang lain, dan secara efektif menerima dan mempresentasikan ide melalui berbagai saluran komunikasi.

Studi komunikasi memiliki contoh-contoh kasus dalam ranah krisis komunikasi lingkungan. Jenis kasus yang terkait dengan lingkungan atau bencana alam merupakan fenomena yang memungkinkan berulang, dapat diprediksi, maupun dapat dicegah atau diatasi dengan keahlian yang terampil. Tantangan terbesar dalam penanganan masalah lingkungan adalah dalam menunjuk entitas atau pihak mana yang harus bertanggung jawab atas penyebaran bencana alam, terutama dalam studi komunikasi (Wahyudin,2018).

Bencana dapat diartikan sebagai fenomena yang kompleks dimana kegiatan dan aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana sangat banyak dan beragam. Banjir merupakan bencana terbesar didunia. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun harus diantisipasi untuk meminimalkaan kerugian yang ditimbulkan. Mistra (2007) menjelaskan bahwa dampak banjir dapat terjadi pada bebrapa aspek, yaitu , yaitu aspek penduduk, aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sarana dan prasarana, aspek Lingkungan.

Kabupaten Tolitoli adalah salah satu provinsi di Pulau Sulawesi, selama ini dikenal sebagai bencana alam berulang yang terjadi hampir setiap tahun. Kabupaten Tolitoli memiliki beberapa kawasan yang rawan bencana banjir saat puncak musim hujan yang panjang dan musim hujan yang deras. Pemukiman rawan banjir ini sebagian besar berada di wilayah Tolitoli kota dan sekitarnya. Penulis memilih Kabupaten Tolitoli karna menjadi salah satu kabupaten yang paling sering mengalami banjir dan hampir setiap musim hujan deras dan musim hujan yang paling rawan terjadi banjir, serta beberapa tahun terakhir Tolioli terus bertambah jumlah daerah yang tergenang banjir.

Pada tahun 2009 terjadi banjir bandang di Kota Tolitoli dengan ketinggian air mencapai satu meter (Tempo, 2009). Dampaknya aktivitas masyarakat kota menjadi lumpuh. Gedung-gedung sekolah tak dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar karena tergenang air. Pasca bencana banjir yang melanda Tolitoli pada tahun 2009 tersebut, memicu terjadinya banjir susulan setiap tahunnya. Salah satu peristiwa banjir bandang di daerah Tolitoli yang masih hangat diingatan masyarakat adalah banjir bandang yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2017. Banjir yang terjadi pada pukul 16.00 WITA yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas sedang (74,49 mm/hari) selama +/- 4 jam mengakibatkan Sungai Tuweley dan Sungai Lembe meluap dengan TMA di permukiman 1-3 meter yang berdampak pada penduduk sebanyak 56.000 KK (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Selain itu, aksesibilitas jalur trans Sulawesi juga ikut terhambat karena adanya bencana banjir tersebut.

Kenyataannya, gejala alam memang tidak bisa diprediksi, namun potensi peningkatan dan kompleksitas bencana di masa depan wajib untuk diwaspadai. Mengabaikan peringatan alam dan cenderung diam tanpa berkomitmen mengurangi risiko bencana merupakan sikap yang fatalistic yang tidak dapat ditolerir. Oleh sebab itu, pengelolaan risiko bencana menjadi keharusan yang mutlak direnungkan oleh segenap elemen masyarakat. Kerugian yang semakin meningkat setiap tahunnya membutuhkan

upaya penanggulangan sebagai salah satu upaya preventif terhadap bencana banjir. Penanggulangan bencana dalam tahap pra bencana atau sebelum terjadinya bencana dimaksudkan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kerugian dalam bencana (Rudianto, 2015).

Komunikasi memegang peranan penting hampir di seluruh aktivitas manusia demikian pula dalam penanggulangan bencana, sehingga pengelolaan komunikasi yang efektif harus menjadi perhatian institusi pemerhati bencana terutama institusi pemerintah terkait. Oleh karena itu instansi terkait harus memahami dan menjalankan strategi komunikasi bencana yang efektif tidak hanya pada saat tanggap darurat saat bencana terjadi namun juga harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tiap tahapan penanggulangan bencana.

Mengingat Indonesia daerah rawan bencana maka diperlukan mitigasi bencana. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang efektif melibatkan peran aktif dari masyarakat di daerah rawan bencana. peran masyarakat dapat diwujudkan melalui komunikasi bencana, baik antar masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah, kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Komunikasi bencana secara umum yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau tindakan. Komunikasi juga menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari pelaku yang terlibat sehingga dalam kegiatan komunikasi terjadi pokok perhatian yang sama terhadap topik yang dibicarakan. (Wardhani, 2011).

Berkaitan dengan bencana, komunikasi dapat berfungsi sebagai radar sosial yang memberi kepastian kepada pihak lain mengenai adanya bencana di suatu tempat. Radar sosial yang dimaksudkan, yaitu memancarkan informasi ke berbagai pihak untuk pengurangan risiko bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. BPBD bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. BPBD Kabupaten Tolitoli inilah yang mengkoordinasi semua perangkat daerah.

Dalam penanggulangan bencana memiliki tiga fase pengelolaan bencana ketika pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Tolitoli memiliki peran strategis dalam menanggulangi bencana khususnya bencana banjir. Maka dalam proses penanggulangan bencana perlu adanya manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi bencana merupakan upaya yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana dengan mengelola proses produksi pesan-pesan atau informasi tentang bencana, penyebaran pesan dan penerimaan pesan dari tahap prabencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana (Lestari, Prabowo, Wibawa, 2010).

Untuk meminimalisir risiko bencana, ketika dan pasca bencana. Fase pra-bencana menjadi fase penting. Dalam fase prabencana memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yaitu ketika tidak terjadi bencana seperti, perencanaan penanggulangan bencana, membuat rancangan pembangunan, menganalisa risiko bencana, pelatihan dan lain

sebagainya. Selanjutnya ketika situasi memiliki potensi risiko bencana seperti kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini.

Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tolitoli sebagai lembaga/institusi yang bertugas dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli yaitu, dengan menyelaraskan aturan kebijakan penanggulangan bencana sesuai perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pengetahuan, serta keahlian masyarakat dalam penanggulangan kebencanaan. Selain itu, dilakukan peningkatan pencegahan dini melalui sosialisasi dan simulasi bencana, serta membuat dan menetapkan kebijakan aturan atau sanksi yang tegas bagi tindakan perusakan lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan, meningkatkan sarana dan prasarana dengan penggunaan peralatan yang lebih canggih dan modern, serta meningkatkan peran relawan dan masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana banjir.

Dari latar belakang di atas ini yaitu tentang penanganan bencana, penulis ingin meneliti lebih bagaimana manajemen komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tolitoli dalam langkah-langkah koordinasi penanganan bencana dengan stakeholder internal maupun eksternal. Hal ini sangat penting untuk diteliti karena BPBD Kabupaten Tolitoli pemeran utama dalam penanganan bencana di wilayah Tolitoli. Selain itu juga animo masyarakat Tolitoli terhadap kebencanaan ini sangat peduli contohnya dengan banyaknya didirikan ormas yang dikhususkan untuk menangani kebencanaan. Bisa dibayangkan bagaimana BPBD Kabupaten Tolitoli sebagai pemangku utama kebencanaan di Tolitoli koordinasi

Mengingat Kabupaten Tolitoli merupakan daerah yang rawan bencana banjir yang demikian maka di perlukan strategi komunikasi yang tepat dalam menyebarkan informasi. Maka dari itu penelitian ini di beri judul “Manajemen Komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tolitoli dalam penanggulangan bencana banjir”.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensif, dengan proses pencatatan secara detail tentang apa yang terjadi di lapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau dengan langsung mengutip hasil wawancara (Suwendra, 2018 : 4). Tipe penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena tertentu secara rinci terkait manajemen komunikasi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli.

Dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif . Studi kasus kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul manajemen komunikasi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli. adalah penelitian tipe atau jenis kualitatif dengan pendekatan kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang diamati). Peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam proses pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan cara purposive sampling . Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini

dilaksanakan dengan didasari oleh metode studi kasus kualitatif, untuk melihat serta meneliti bagaimana manajemen komunikasi badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli.

3. Hasil Penelitian

Perencanaan pada dasarnya dilakukan jauh sebelum suatu kegiatan berlangsung. Perencanaan dibuat untuk dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Perencanaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan manajemen komunikasi bencana. Perencanaan dibuat sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan manajemen komunikasi bencana.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir didahului dengan proses perencanaan. Proses perencanaan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tolitoli sebagai komunikator atau penyelenggara kegiatan komunikasi PRB. Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Tolitoli meliputi perencanaan prabencana dan pasca bencana. Serta apasaja yang pesan yang diberikan ke masyarakat dan melalui media apa juga masyarakat sebagai komunikan yang menerima pesan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolitoli.

Perencanaan dibuat sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan manajemen komunikasi bencana. Lestari (2011: 96-98) adalah menyusun segala hal-hal yang diperlukan untuk dipikirkan secara matang sebelum dilaksanakan penerjunan lapangan, hal ini guna untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun perencanaan yang dibuat BPBD Kab.Tolitoli mereka membuat khusus perencanaan untuk pada pra bencana dan masa pasca bencana

Pertama tindakan apa yang dikerjakan BPBD Kab.Tolitoli dalam masa normal penanganan bencana dan sesuai data yang di dapat peneliti akan uraikan dibawah :

Yang pertama adalah DESTANA desa tangguh bencana Destana adalah program dimana suatu desa mereka diajarkan bagaimana evakuasi, bagaimana mereka dilatih cara penanganan menghadapi macam-macam bencana ini seperti apa, serta mereka memiliki alat pendukung penanganan bencana semacam HT alat komunikasi, akses jalan evakuasi, transportasi.

Kedua, pelatihan relawan sangat dibutuhkan olrh organisasi atau perusahaan agar mendapatkan pekerja berkualitas tinggi.Salah satu tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan relawan adalah mendapatkan anggota-anggota yang berkualitas, Program semacam ini merupakan kesempatan emas untuk mendapatkan talenta terbaik, lewat serangkaian pembelajaran secara ketat dan spesifik.

Ketiga, pelatihan mitigasi di Sekolah, Kantor, Dan Rumah Sakit yaitu BPBD mengadakan pelatihan mitigasi yang dilakukan BPBD Kab.Tolitoli adalah meningkatkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat dalam menyelamatkan diri secara mandiri menghadapi bencana alam. Dan sasarannya selain desa pada bab diatas, mereka melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah mulai dari paud sampai sma sekolah menengah atas, selain itu ada instansiinstansi lainnya seperti perkantoran,puskesmas, rumah sakit, dunia usaha, seperti yang dikatakan ade. Ada beberapa materi mitigasi bencana ini untuk diajarkan, karena setiap bencana berbeda itu akan beda juga cara penyelamatannya bagaimana. Seperti gempa bumi misalnya, ketika kita sedang berada di gedung dan gempa bumi dateng hal pertama yang kita lakukan adalah tutupi kepala lalu pergi ke sudut ruangan gedung tersebut. Berbeda dengan tsunami dateng, kita diharuskan lari ke patokan jalur evakuasi yang sudah disediakan pemerintah sebelumnya.

Peneliti menilai bahwa dari program pelatihan mitigasi ini sesuai dengan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam amanat peraturan daerah. pelatihan mitigasi juga merupakan kegiatan pada pra bencana yang artinya menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana apapun. Dan ini sesuai masuk dalam konsep perencanaan yang peneliti ambil.

ketiga program tersebut merupakan dari beberapa program lainnya dan memang diharapkan BPBD Kab.Tolitoli meminimalisir dampak yang lebih besar dari dampak bencana. Disini peneliti menilai bahwa dari 3 program tersebut adalah program yang sesuai bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dari berbagai aspek.

Pengorganisasian adalah suatu struktur pembagian wilayah kerja yang dimana di setiap bidang divisi bakal diisi dengan orang-orang yang kompeten. Seperti Lestari (2011: 96-98) menuturkan bahwa pengorganisasian ini merupakan hal yang paling perlu dimana proses penempatan pembagian kerja yang sesuai dengan setiap orang yang memiliki kemampuan tersebut.

Hubungannya dengan BPBD Kab.Tolitoli adalah mereka membutuhkan yang namanya pengorganisasian ini, di dalam BPBD karena untuk menangani bencana ada berbagai bidang yang harus dimiliki. Selanjutnya peneliti akan bahas dibawah ini pengorganisasian yang dibangun oleh BPBD Kab.Tolitoli :

Kepala badan yaitu sekretaris daerah Tolitoli, dibantu Kepala unsur pelaksana, sekretariat yang dibagi tiga sub antara lain : 1.sub bagian perencanaan dan pelaporan, 2. Sub bagian keuangan, 3. Sub bagian umum dan kepegawaian. Lalu selanjutnya ada 3 bidang yang krusial dalam penanganan bencana yaitu : 1. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 2. Bid. Kedaruratan dan Logistik, 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Di dalam pengorganisasian BPBD Kab.Tolitoli terdapat 3 bidang yang peneliti pilih dalam mengambil data karena ke tiga bidang ini lah yang terkait utama dalam penanganan bencana. Mulai dari pra bencana tentu ini bagian dari Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang kedua bagian dimana pas bencana yaitu Bid. Kedaruratan dan Logistik dan yang terakhir bagian pasca bencana yaitu Bid. 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Di ketiga bidang tersebut tentu terdapat staff seksi yang membantu kepala bidangnya. namun dalam kerjanya mereka tidak bekerja sendiri ada dimana mereka saling bekerjasama seperti pada pas bencana.

Dalam menjalankan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, BPBD Kabupaten Tolitoli tidak bekerja sendiri. Seperti makna yang tersirat dalam gambar segitiga biru pada logo BPBD, yang melambangkan kerjasama dan sinergisitas antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana, terdapat beberapa pihak, lembaga, maupun instansi yang terlibat dalam keberlangsungan kegiatan pengurangan risiko bencana, yang selanjutnya disebut sebagai aktor komunikasi pengurangan risiko bencana.

Setelah melakukan analisis situasi dan perencanaan, BPBD Kabupaten Tolitoli dapat menjalankan program kerja pengurangan risiko bencana banjir. Program kerja dijalankan oleh panitia pelaksana. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan proses perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir mengedepankan asas kebermanfaatn bagi semua pihak tidak terutama masyarakat Kabupaten Tolitoli. Salah satunya tujuan penyelenggaraan kegiatan program kerja pengurangan risiko bencana banjir adalah untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sadar dan siap siaga dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir atau mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana banjir. Karena dalam mengatasi bencana banjir, tidak

hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menanggulangnya, akan tetapi faktor terbesar adalah dari masyarakat sendiri.

Setelah pelaksanaan program kerja selesai dilakukan, BPBD Kabupaten Tolitoli kemudian melakukan evaluasi dan pengontrolan. Evaluasi atau pengendalian yang dilakukan merupakan evaluasi kegiatan program kerja yang diselenggarakan melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan. Tujuan utama fungsi pengendalian adalah, agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi komunikasi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Selain itu, pengontrolan terhadap pesan komunikasi dalam program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah dengan kelompok relawan bencana dan relawan industri. Pengontrolan juga dilakukan dengan meninjau ulang daerah-daerah yang tempat pelaksanaan program kerja komunikasi pengurangan risiko bencana banjir. Peninjauan ulang dilakukan dengan tujuan melakukan pengontrolan apakah pesan komunikasi sudah tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

4. Pembahasan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa komunikasi merupakan salah satu kebutuhan paling penting bagi manusia, dengan adanya komunikasi manusia dapat berhubungan langsung meskipun salah satunya berda di tempat yang jauh. Dalam upaya membangun masyarakat tangguh bencana di Desa Ogoele terdapat hambatan berupa jaringan komunikasi yang sulit. Hal ini dapat mengganggu kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Anwar selaku staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tolitoli, bahwa jaringan komunikasi di Desa Ogoele sangat sulit, padahal dalam kegiatan penanggulangan bencana membutuhkan komunikasi yang intens agar jika suatu waktu terjadi bencana, dapat menjalankan komunikasi dengan baik. Kesulitan jaringan komunikasi tersebut diatasi dengan Handy Talky untuk menjalin komunikasi.

Hambatan dari pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko di Kabupaten Tolitoli antara lain anggaran dana yang tidak sesuai dengan wilayah Kabupaten Tolitoli yang luas. Karena wilayah yang luas tersebut pula membuat sulitnya menjangkau semua masyarakat di wilayah rawan bencana dalam waktu yang singkat, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berproses.

Kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah kepada BPBD masih kurang dari perkiraan. Dari anggaran yang diberikan pemerintah tersebut kemudian digunakan untuk penanggulangan bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Tolitoli tidak terkecuali banjir. Anggaran itu selain digunakan untuk keadaan darurat, anggaran tersebut juga digunakan untuk kegiatan pra bencana seperti sosialisasi, anggaran itu juga digunakan untuk pengembangan fisik seperti drainase dll.

Kurangnya sarana dan prasarana, dalam Kamus Besar Indonesia (KKBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan panunjang utama terselenggaranya suatu proses. Menurut fungsinya sarana dan prasarana mempunyai

fungsi berbeda-beda sesuai dengan lingkup dan tujuannya yang sama yakni mencapai hasil yang diterapkan sesuai dengan rencana.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang sangat penting untuk dipenuhi karna terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja, Tanpa sarana dan prasarana yang memadai penanggulangan bencana tidak dapat optimal.

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menjabarkan hasil penelitian mengenai Manajemen komunikasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Perencanaan manajemen komunikasi BPBD dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Tolitoli, disini BPBD sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan saat prabencana BPBD Kab. Tolitoli memiliki beberapa program melalui media dan pembinaan masyarakat sebagai komunikasi dalam menghadapi bencana, Seperti program pelatihan mitigasi bencana, desa tangguh (destana), dan pelatihan relawan serta pada pasca bencana BPBD Kab. Tolitoli memiliki rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Pengorganizing dan kerja sama mitra, disini menjelaskan bahwa BPBD Kab.Tolitoli bahwa mereka mempunyai struktur organisasi dan tugas bidangnya masing-masing yang jelas. Lalu mereka memiliki mitra relawan non pemerintah maupun dari badan pemerintah daerah.Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana bsnjir sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya,. Masyarakat juga selalu tanggap dalam menyikapi himbauan dari pemerintah seperti peringatan prabencana dan keikutsertaan dalam pengadaan logistik dan bahan pembuatan pondasi penahan tebing.

Pelaksanaan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli, disini Pesan komunikasi pada program sosialisasi, simulasi dan pembentukan relawan bencana disusun secara persuasif dan edukatif dengan strategi komunikasi partisipatif, sedangkan pada program. Sedangkan dalam program penyebaran informasi melalui media massa, pesan komunikasi disusun secara informatif dan strategi yang digunakan dengan membuat press release yang kemudian diberikan kepada pers dari berbagai media. Pesan komunikasi dalam program kerja koordinasi dengan instansi lain disusun secara persuasif. Evaluasi, disini Evaluasi komunikasi pengurangan risiko bencana banjir pada program sosialisasi, simulasi, dan pembentukan relawan bencana dilakukan dalam tiga tahap yaitu melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan, rapat bulanan, dan peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja. Sedangkan dalam program lainnya, hanya dilakukan evaluasi pada rapat internal bulanan.

Hambatan komunikasi yang dialami BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli antara lain: kegiatan penanggulangan bencana, memerlukan komunikasi yang intens, akan tetapi di beberapa masih sangat sulit untuk melaksanakan komunikasi dikarenakan jaringan yang sulit; hambatannya di anggaran kegiatan, karena tidak semua kegiatan-kegiatan dalam menanggulangi resiko bencana itu kurangnya anggaran dari BPBD Kab.Tolitoli; dan kurangnya sarana dan prasarana dari BPBD Kab.Tolitoli menjadi salah satu penghambat penanggulangan banjir

Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pemberian bantuan anggaran kepada korban bencana khususnya korban banjir melalui Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD). Pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan sebagian APBD untuk membantu kegiatan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir. Sebaiknya BPBD Kab.Tolitoli lebih intens dan terus-menerus dalam melakukan program mitigasi terkhusus pelatihan relawan ke masyarakat Kab.Tolitoli tidak hanya dilakukan setahun sekali.

Referensi

- Harry Eko Susanto. 2011. *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Hermawan, H. 2018. *Geowisata sebagai Model Pemanfaatan Kekayaan Geologi yang Berwawasan Lingkungan*. STP AMPTA Yogyakarta.
- Leiss W. 1994. *Risk Communication and Public Knowledge*. Di dalam :Crowley D, Mitchell D, editor. *Communication Theory Today*. California (US): Stanford University Press.
- Mistra, 2007 . *Antisipasi Rumah di Daerah Rawan Banjir*, Depok.: Penebar Swadaya
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*. Kencana. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Bandung*: PT Remaja Rosdakarya. *Remaja Rosdakarya*. Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nazamuddin. 2007. *Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana : Pelajaran dan Bencana Tsunami di Aceh* Dr. Nazamuddin, MA. *Kongres Ilmu Pengetahuan Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2007*
- Noor. Djauhari. 2014. *Geologi untuk Perencanaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ruben, Brent D. 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Renn, O. 2008. *Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World*. London : Earthscan.
- Sellnow, T. dan Matthew, S. 2013. *Theorizing Crisis Communication*. England:Wiley-Blackwell.
- Sandhyavitri A. 2014 “ *Investigasi Tingkat Kerawanan Lereng Untuk Penyusunan Strategi Penanganan Jalan dan Lereng* . Prosiding FSTPT XII, Surabaya
- Wahyudin, Eko Aji. 2018. *Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Molengong, Lexy J,Dr. M.A.2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2009 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta Press.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Uns Press. Surakarta. Undang – Undang Nomer 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Suwendra, I. Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2013: *Bencana di Indonesia 2012* <https://bpbd.go.id/uploads/migration/pubs/30.pdf>.Diakses pada 03 Juli 2022, pukul 10.56 WITA)
- Kristanti, L. L. 2019. *Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang*. In *Riset Komunikasi*.
- Lestari, P. 2018. *Perspektif Komunikasi Bencana*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://eprints.upnyk.ac.id/23779/1/Puji Lestari - Buku](http://eprints.upnyk.ac.id/23779/1/Puji%20Lestari%20-%20Buku%20Komunikasi%20Bencana.pdf)

- Komunikasi Bencana Aspek Penting.pdf.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/113069>. (Diakses pada 27 Juli 2022, pukul 17.26 WITA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. <https://bpbd.jakarta.go.id/perpustakaan/18/peraturan-pemerintah-pp-no-21-tahun-2008>. (Diakses pada 27 Juni 2022, pukul 20.23 WITA)
- Puji Lestari, Agung Prabowo, Arif Wibawa. 2012. Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 10 No. 02. Di akses dari <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/125>
- Rudianto. 2015. *Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana*. *Jurnal Simbolika* Vol 1 No. 1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/49>. (Diakses pada 2 Juni 2022, pukul 13.19 WITA)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>. (Diakses pada 19 Juni 2022, pukul 09.48 WITA)
- Wardhani, A. C. 2011. Urgensi Komunikasi Bencana dalam Mempersiapkan Warga di Daerah Rawan Bencana. *Unila*, 1–12. Retrieved from [http://digilib.unila.ac.id/1993/1/URGensi KOMUNIKASI BENCANA -ANDY CORRY.pdf](http://digilib.unila.ac.id/1993/1/URGensi%20KOMUNIKASI%20BENCANA%20-ANDY%20CORYY.pdf) (Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 10.50)